

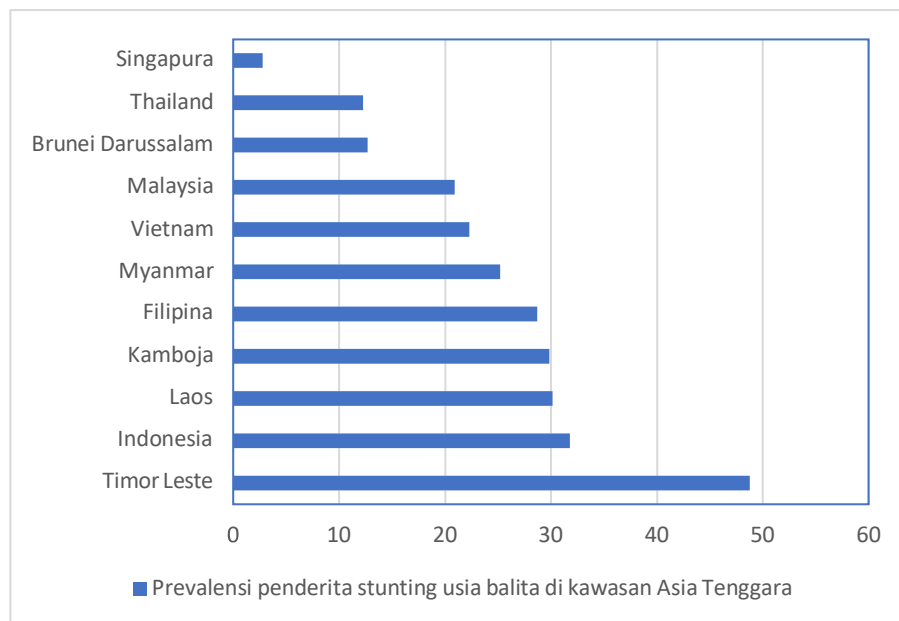
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting adalah salah satu masalah serius di Indonesia. Menurut laporan Bank Pembangunan Asia (ADB), prevalensi stunting di Indonesia mencapai 31,8% saat tahun 2020. Angka ini menjadikan Indonesia negara dengan angka prevalensi tertinggi nomor dua di Asia Tenggara sesudah Timor Leste. Angka tersebut masih jauh dari target yang diputuskan oleh World Health Organization (WHO), ialah di bawah 20 persen.

Grafik 1-Prevalensi Penderita Stunting di Asia Tenggara Tahun 2020

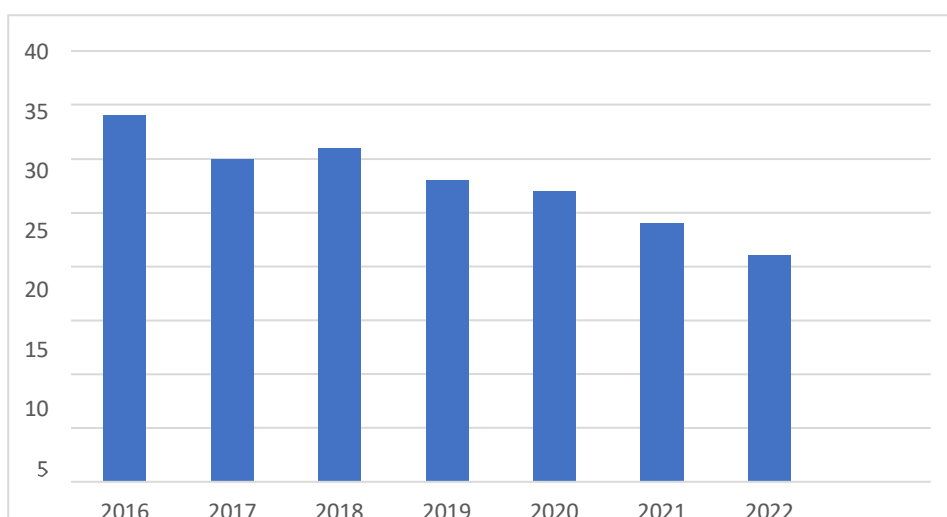


Sumber : Asian Development Bank, diolah peneliti (2023)

Stunting, atau kondisi kerdil, adalah keadaan di mana balita mengalami kegagalan tumbuh akibat pola asuh yang tidak memadai dari dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupannya. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan

No. 1995/MENKES/SK/XII/2010, pengukuran stunting pada anak dilakukan menggunakan indeks Panjang Badan anak berdasar Umur (PB/U) atau Tinggi Badan anak berdasarkan Umur (TB/U). Pemerintah Republik Indonesia sudah memutuskan stunting sebagai isu prioritas nasional, yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dalam rencana ini, ada target penurunan signifikan, dari 27% saat periode 2019 menjadi 14% saat periode 2024.

Grafik 2-Angka Prevalensi Stunting di Indonesia Tahun 2016-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah peneliti (2023)

Dari data tersebut, terlihat bahwa meskipun prevalensi stunting di Indonesia telah menghadapi penurunan, masih dibutuhkan usaha yang lebih cepat untuk menggapai target 14% saat tahun 2024. Untuk mendukung pencapaian target nasional ini, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting, yang mencakup sasaran dan strategi nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo memilih Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator

utama dalam percepatan turunnya stunting. BKKBN bertanggung jawab memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran untuk mengurangi angka stunting. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa percepatan penurunan stunting dijalankan dengan cara menyeluruh, integratif, dan bermutu melewati koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara lembaga, kementerian, kabupaten, pemerintah provinsi, dan desa, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pada pelaksanaan strategi nasional untuk mempercepat turunnya stunting, disusunlah rencana aksi nasional yang mengadopsi pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting. Rencana aksi ini mencakup beberapa kegiatan prioritas, yaitu :

- a. Persiapan data mengenai keluarga yang berisiko stunting
- b. Pendampingan bagi keluarga yang berisiko stunting
- c. Pendampingan untuk calon pengantin dan calon Pasangan Usia Subur (PUS)
- d. Audit kasus stunting
- e. Surveilans terhadap keluarga berisiko stunting

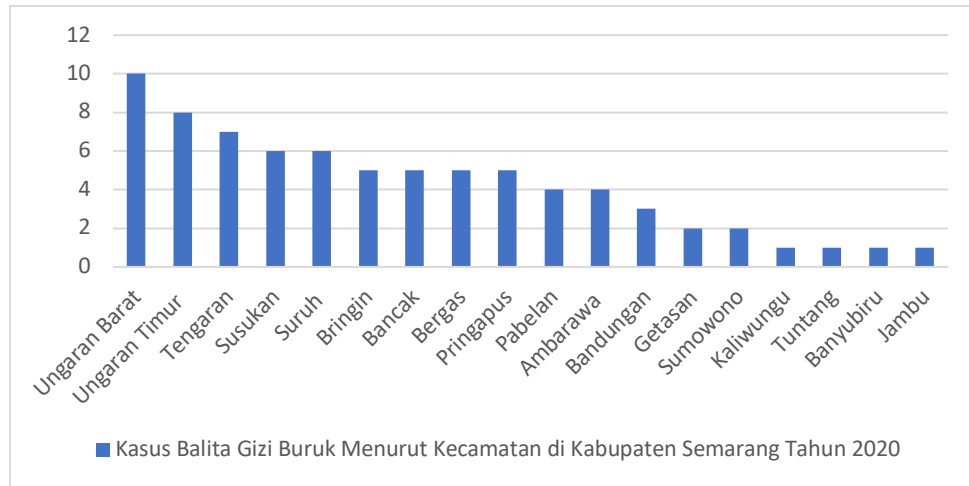
BKKBN menekankan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan stunting, khususnya selama periode seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari 270 hari masa kehamilan hingga 730 hari sesudah kelahiran. Untuk itu, intervensi pencegahan stunting harus dilakukan sejak awal, bahkan sebelum pernikahan. Risiko stunting sudah dapat muncul sebelum kehamilan terjadi, sehingga berdasar Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting, pencegahan harus dimulai setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum menikah. Perihal tersebut penting karena besarnya angka anemia dan kekurangan

gizi di kalangan remaja putri dapat berkontribusi pada terjadinya stunting pada anak. Dengan memastikan kesehatan yang baik sebelum kehamilan, diharapkan risiko stunting dapat diminimalkan sejak awal.

Untuk melaksanakan intervensi ini, diperlukan instrumen yang digunakan untuk memantau dan memonitor kondisi kesehatan calon pengantin. BKKBN sudah memperluas Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang dibuat untuk memantau dan mendampingi calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan dan kehamilannya. Aplikasi Elsimil berfungsi sebagai instrumen pemantauan serta pendampingan sekaligus sebagai *big data* yang memberikan analisis tentang kondisi kesehatan calon pengantin di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan jika ditemukan calon pengantin yang belum memenuhi standar kesehatan, mereka bisa segera mendapatkan intervensi melalui pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terbagi dari petugas BKKBN yang bekerja sama dengan Kader PKK dan bidan.

Kabupaten Semarang ialah kabupaten yang letaknya di Provinsi Jawa Tengah, masih mencatat 3.190 kasus stunting pada anak pada tahun 2023. Kasus stunting di daerah ini sebagian besar disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dan penanganan yang kurang optimal selama seribu hari pertama kehidupan, terhitung dari saat hamil hingga saat anak usia di bawah dua tahun (Baduta). Sebaran kasus balita dengan gizi buruk per kecamatan di Kab. Semarang saat tahun 2020 bisa digambarkan melewati grafik berikut :

Grafik 3-Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan di Kab. Semarang Tahun 2020



Sumber : RPJMD Kab. Semarang 2021-2026

Menurut grafik di atas diketahui bahwa Kecamatan Ungaran Barat memiliki jumlah kasus balita gizi buruk terbanyak di Kabupaten Semarang yaitu sebanyak 10 kasus. Menurut penilaian status gizi berdasarkan penimbangan serentak indikator usia 0 -59 bulan wilayah UPTD Puskesmas Lerep dan Puskesmas Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, data balita stunting adalah sebagai berikut :

Tabel 1-Data Balita Stunting Wilayah Kecamatan Ungaran Barat

No	Desa	Sangat Pendek	Pendek	Total
1.	Bandarjo	9	26	35
2.	Lerep	5	25	30
3.	Keji	1	12	13
4.	Kalisidi	8	17	25
5.	Branjang	7	14	21
6.	Nyatnyono	3	28	31
7.	Ungaran	2	12	14
8.	Genuk	0	15	15
9.	Langensari	5	38	43
10.	Candirejo	2	16	18
11.	Gogik	1	5	6

Sumber : Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, diolah peneliti (2023)

Dari data kasus stunting tersebut pemerintah menerapkan usaha percepatan penurunan stunting dari hulu dengan memastikan tiap pasangan calon pengantin mendapatkan pendampingan dan edukasi dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di Kelurahan/ Desa masing-masing sesuai kawasan domisili calon pengantin. Untuk mendukung kegiatan pendampingan tersebut, petugas pendamping dibekali dengan aplikasi Elsimil bagi Tim Pendamping Keluarga.

Aplikasi Elsimil yang saat ini dikembangkan terdiri dari 2 (dua) jenis yakni aplikasi Elsimil untuk calon pengantin serta aplikasi Elsimil untuk Tim Pendamping Keluarga. Calon pengantin dapat mengunduh pada Playstore untuk perangkat Android dan pada Apple Store untuk IOS. Sementara itu, Petugas Pendamping yang meliputi Kader PKK, Kader KB, dan Bidan juga bisa mengakses aplikasi di web melalui tautan <https://elsimil.bkkbn.go.id>.

Dalam aplikasi ini, kedua calon pengantin diminta mengisi kuesioner yang mencakup berbagai variabel. Untuk calon pengantin perempuan, terdapat lima variabel yang harus diisi yaitu usia, indeks massa tubuh (berat badan dan tinggi badan), ukuran lingkaran lengan (LiLA), kadar hemoglobin (HB) dalam darah, dan sikap merokok atau paparan asap rokok. Sementara untuk calon pengantin laki-laki, hanya dua variabel yang perlu diisi yaitu perilaku dan usia atau paparan asap rokok. Kuesioner ini diisi setelah calon pengantin menjalankan pengecekan di fasilitas kesehatan (Faskes).

Aplikasi Elsimil akan secara langsung memberikan skor berdasarkan pertanyaan yang telah diisi. Hasilnya akan ditampilkan dengan indikator berwarna hijau atau merah. Indikator merah menunjukkan adanya variabel yang tidak

memenuhi standar normal, yang dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan stunting jika tidak ada perbaikan kesehatan. Jika ada variabel dengan indikator merah menjelang pernikahan, Tim Pendamping Keluarga akan memberikan pendampingan melalui fitur chat pada aplikasi Elsimil. Calon pengantin juga dapat berkonsultasi dengan Petugas Pendamping melalui telepon atau tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Indikator hijau berarti semua variabel sudah ideal, dan calon pengantin dapat mengunduh sertifikat Elsimil, yang kemudian dibawa saat pendaftaran pernikahan di KUA atau Dukcapil.

Aplikasi elsimil memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin. Untuk memudahkan pemilihan calon pengantin yang membutuhkan pendampingan, kader KB bertanggung jawab untuk memilih calon pengantin tersebut. Setelah itu, kader KB akan mengirimkan tautan pendampingan kepada Kader PKK dan Tenaga Kesehatan/Bidan. Secara otomatis satu calon pengantin akan didampingi oleh satu Tim Pendamping Keluarga yang terbagi dari Kader KB, Kader PKK, dan Tenaga Kesehatan/Bidan. Petugas pendamping memberikan pendampingan yang bisa dilakukan melalui fitur chat di aplikasi Elsimil. Beberapa jenis intervensi/pendampingan yang wajib diberikan kepada calon pengantin diantaranya yaitu :

1. Pemberian suplemen penambah darah untuk calon pengantin yang mengalami anemia

2. Pemberian suplemen makanan untuk calon pengantin yang mengalami KEK (kurang energi kronis)
3. Aktivitas komunikasi, informasi, dan edukasi kepada calon pengantin
4. Pemberian rujukan kepada calon pengantin ke fasilitas kesehatan

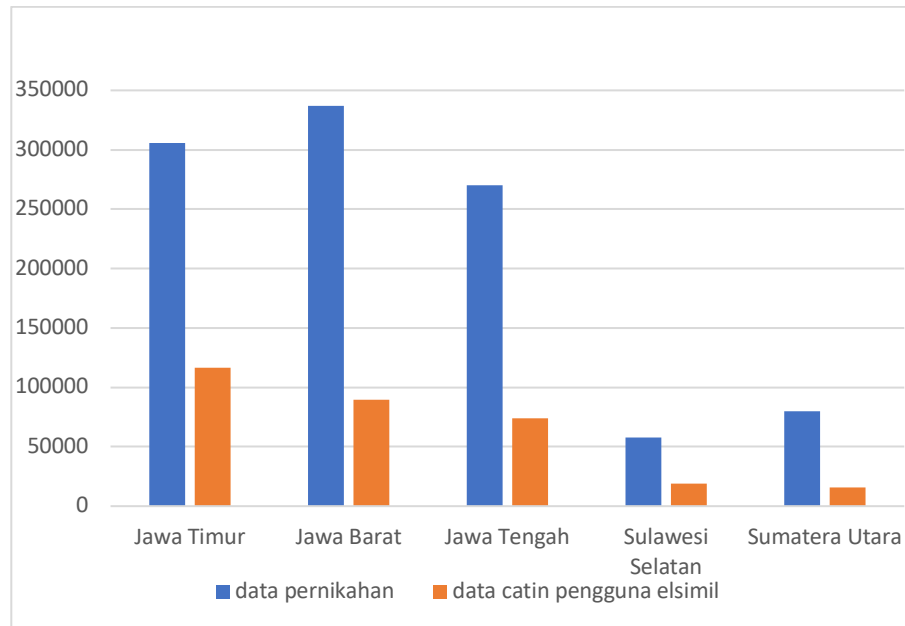
Oleh karena itu, selain keterampilan dalam melakukan pendampingan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga perlu terampil dalam menggunakan aplikasi Elsimil bagi TPK itu sendiri.

Implementasi program Elsimil mengalami beberapa permasalahan yang juga terjadi di kota lain. Hasil monitoring dan evaluasi program Elsimil di DIY menunjukkan bahwa dari 9.195 calon pengantin yang terdaftar di aplikasi Elsimil hanya 5.088 calon pengantin saja yang telah menyelesaikan registrasi Elsimil dan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga. Sementara itu jumlah pernikahan di KUA DIY tahun 2022 sebanyak 30.992 pernikahan. Artinya jumlah pengantin yang mendapatkan pendampingan hanyalah sebesar 16,4% saja.

Menurut data dari pusat informasi Elsimil, 456.984 calon pengantin telah mengunduh dan menggunakan aplikasi ini. Namun, angka ini hanya mencakup sekitar seperempat dari total pernikahan yang terjadi di Indonesia, yang kisaran antara 1,8 juta hingga 2 juta per tahun. Hal ini menandakan bahwasanya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui adanya program elsimil ini.

~

Grafik 4-Data Perbandingan Antara Pernikahan dengan Calon Pengantin yang telah Menggunakan Elsimil 2022



Sumber : Satu Data Kementrian Agama RI, diolah peneliti (2024)

Data diatas merupakan provinsi dengan jumlah pengunduh aplikasi Elsimil terbanyak di Indonesia. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah perkawinan yang terjadi, pendampingan dan penggunaan aplikasi Elsimil ini belum mencapai setengahnya. Ini menunjukkan bahwa banyak orang di Indonesia belum tahu tentang program Elektronik Siap Nikah dan Hamil.

Implementasi aplikasi Elsimil di Kecamatan Ungaran Barat dalam rangka percepatan penurunan stunting juga mengalami beberapa kendala. Banyak calon pengantin yang baru mengunjungi fasilitas kesehatan mendekati hari pernikahan, sehingga skrining yang seharusnya dilakukan tiga bulan sebelum pernikahan

belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut dinilai bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga sejak sosialisasi awal belum efektif. Selain itu masih terdapat beberapa calon pengantin yang tidak menyelesaikan pendampingan dan tidak mendapatkan tanda tangan dari Tim Pendamping Keluarga.

Tabel 2-Data Calon Pengantin yang Mendapatkan Tanda Tangan dan yang Tidak Mendapatkan Tanda Tangan

Nama Kelurahan	Jumlah Calon Pengantin	Total Calon Pengantin yang Mendapatkan Tanda Tangan	Total Calon Pengantin yang Tidak Mendapatkan Tanda Tangan
Candirejo	2	1	1
Genuk	6	2	4
Ungaran	6	5	1
Bandarjo	7	6	1
Langensari	4	1	3
Branjang	7	5	2
Kalisidi	6	3	3
Keji	2	2	0
Lerep	7	6	1
Nyatnyono	9	5	4
Gogik	2	0	2

Sumber : DP3KAB Kabupaten Semarang diolah peneliti (2024)

Ketidakpatuhan calon pengantin ini menunjukkan kurangnya keberlanjutan komunikasi dari Tim Pendamping Keluarga Kecamatan Ungaran Barat. Maka dari itu dibutuhkan komunikasi yang baik serta respon yang cakap dari Tim Pendamping Keluarga Kecamatan Ungaran Barat. Permasalahan komunikasi pada implementasi Elsimil terletak pada terbatasnya pertemuan secara tatap muka antara Tim Pendamping Keluarga dengan calon pengantin di Kecamatan Ungaran Barat karena pendampingan lebih banyak dilakukan melalui fitur chat pada aplikasi Elsimil atau whatsapp. Terbatasnya pertemuan secara tatap muka ini menimbulkan perbedaan feedback pada masing-masing calon pengantin. Terdapat

beberapa pasangan calon pengantin yang mampu menerima informasi dengan cepat, namun terdapat juga yang lambat.

Empat komponen utama yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi disebutkan oleh Edwards III antara lain adalah struktur birokrasi, komunikasi, disposisi, dan sumber daya atau perilaku (Purwanto dan Sulistyastuti dalam Ramadani, 2019, hal. 6). Dalam implementasi program Elsimil, komunikasi memiliki peranan penting. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang berperan adalah mekanisme dan syarat utama untuk pelaksanaan program yang efektif. Semakin baik komunikasi dan koordinasi antara semua pihak, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam implementasi, dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai proses komunikasi kebijakan percepatan penurunan stunting dalam implementasi program Elsimil khususnya di Kecamatan Ungaran Barat. Studi ini merupakan pengembangan variabel implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III, dengan difokuskan pada dimensi komunikasi program. Maka dari itu judul yang peneliti ambil dalam studi ini ialah **“Komunikasi Program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Sejak awal implementasi program Elsimil di tahun 2022 hanya $\frac{1}{4}$ masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan aplikasi elsimil sebelum menikah. Hal tersebut dapat menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aplikasi elektronik siap nikah dan hamil (Elsimil).

2. Masih terdapat calon pengantin di Kecamatan Ungaran Barat yang tidak menyelesaikan pendampingan dan tidak mendapatkan tanda tangan dari Tim Pendamping Keluarga. Ketidakpatuhan calon pengantin ini menunjukkan kurangnya keberlanjutan dan konsistensi informasi dari Tim Pendamping Keluarga Kecamatan Ungaran Barat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong proses komunikasi komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong proses komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan teoritis

Harapan dari studi ini adalah membagikan kontribusi data tentang proses komunikasi komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat.

1.5.2 Kegunaan praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil studi ini diinginkan bisa menambah pengetahuan peneliti mengenai proses komunikasi komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat.

2. Bagi Departemen Administrasi Publik

Hasil studi ini diinginkan bisa menjadi tambahan penelitian dan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya terkait proses komunikasi komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang

Hasil studi ini diinginkan memberikan masukan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada serta memberikan saran dan acuan langkah penyempurnaan terhadap proses komunikasi komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait komunikasi kebijakan mempunyai persamaan dan perbedaan dengan yang akan peneliti jalankan. Perbedaan tersebut berada pada teori yang dimanfaatkan. Beberapa diantara penelitian tersebut memanfaatkan teori yang disampaikan oleh Van Horn, teori sistem komunikasi yang dikemukakan oleh Katherine Miller, teori triple helix atau masih membahas implementasi kebijakan dengan teori George C. Edward secara umum maupun menggunakan teori dan indikator yang berbeda dengan peneliti. Beberapa penelitian juga memiliki kesamaan teori dan indikator penentu keberhasilan komunikasi kebijakan yang digunakan oleh peneliti. Teori yang dimanfaatkan ialah teori komunikasi kebijakan George C. Edward dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi.

Tabel 3-Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun dan Judul	Metode Penelitian dan Tujuan	Hasil Penelitian
1.	(AF Syaripudin, T Nur, D Meigawati, 2020) Komunikasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan reklame di Kota Sukabumi	Kualitatif Tujuaannya untuk memahami komunikasi kebijakan publik untuk penyelenggaraan reklame di Kota Sukabumi.	Komunikasi Kebijakan publik untuk penyelenggaraan reklamu di Sukabumi masih kurang maksimal. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masih banyak orang yang melakukan tindakan yang melanggar Perda Kota Sukabumi No. 17 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan reklame. Selain itu, data penyelenggaraan reklame tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga sulit untuk menemukan pelanggaran reklame.

2.	(B Santoso, S Sunarto, B Hasibuan, 2021) <i>Communication Process And Evaluation In The Implementation Of Modern Retail Policy In Dki Jakarta</i>	Kualitatif Untuk mempelajari berlangsungnya proses komunikasi dan evaluasi agar masalah tidak muncul dan terulang kembali.	Menunjukkan proses komunikasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan ritel kontemporer. Proses implementasi akan lebih mudah dengan komunikasi yang efektif. teori sistem Katherine Miller digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan sistem yang dipilih pemerintah bisa berdampak besar pada pemangku kepentingan dan industry usaha. Dengan teori ini, masalah yang muncul akan dibantu oleh komunikasi internal dan eksternal pemerintahan khususnya implementasi ritel modern di Provinsi DKI Jakarta. Diperlukan penekanan yang lebih besar pada umpan balik dalam komunikasi internal dan eksternal. Umpan balik seharusnya digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi.
3.	(E Engkus, 2020) Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai Melalui E- Warong	Kualitatif Tujuan studi ini ialah untuk memahami bagaimana implementasi komunikasi kebijakan pemerintah pusat berupa bantuan nontunai di level terendah.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya meskipun komunikasi kebijakan BPNT telah dilakukan, nyatanya belum sepenuhnya optimal. Komunikasi antara kelurahan dan pemerintah pusat masih belum lancar, yang mengakibatkan melemahnya peran dan fungsi kelurahan. Program tidak mampu mencapai tujuannya dikarenakan struktur birokrasi yang tidak jelas, kurangnya sdm, dan data yang tersedia belum diperbarui.
4.	(YN Nani, 2021) Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo)	Kualitatif Mendeskripsikan peran komunikasi dalam penerapan kebijakan untuk memperluas akses pendidikan dengan cara merata khususnya untuk sasaran kebijakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan secara merata melibatkan komunikasi yang terstruktur dalam pola-pola kewenangan formal. Ini mencakup komunikasi vertical, horizontal, dan informal antara kelompok-kelompok kepentingan dalam kewenangannya pada birokrasi. Komunikasi dalam implementasi ini memainkan peran penting dalam mencapai efektivitas dan kinerja yang optimal. Selain itu,

			pola birokrasi yang hierarkis juga memengaruhi keberhasilan komunikasi kebijakan.
5.	(A Syarif, AA Unde, 2014) Pentingnya Komunikasi Dan Informasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Makassar	Kualitatif Tujuannya yaitu memahami seberapa penting komunikasi, informasi, dan faktor yang berperan dalam penerapan kebijakan ini.	Komunikasi dan informasi merupakan komponen yang vital dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tiga indikator utama yang mempengaruhi diantaranya yaitu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Selain itu, penelitian ini dianalisis berdasarkan sumberdaya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi. Keempat aspek tersebut berada dalam kelas standar yang berarti implementasi kebijakan ini memerlukan perbaikan untuk mencapai efektivitas dan pengurangan risiko bencana yang lebih optimal.
6.	(AK Syani, S Mufid, M Hazin, 2018) Komunikasi Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9Tahun Di Kecamatan Ngadiluwih	Kualitatif Memahami implementasi kebijakan tersebut pada suatu daerah, terutama dalam hal komunikasi dan sosialisasinya.	Terdapat empat aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, salah satu diantaranya adalah komunikasi. Ada tiga indikator penting dalam komunikasi ialah transmisi, kontinuitas, dan kejelasan informasi. Implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh data yang mana semua siswa bisa melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau sederajat dengan tingkat putus sekolah kurang dari satu persen.
7.	(HA Posangi, F Lengkong, S Dengo, 2020) Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow	Kualitatif Mempelajari bagaimana cara komunikasi dalam penerapan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di dispendukcapil Kab. Bolaang Mongondow	Hasil penelitian menunjukkan bahwa “ 1. Indikator transmisi terlihat dari adanya sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat 2. Kejelasan tercermin dari kebijakan administrasi kependudukan yang telah jelas disampaikan ke seluruh pihak 3. Konsistensi terlihat dari penjelasan atau keterangan yang disampaikan komunikator telah sejalan dengan ketentuan atau pernyataan dalam kebijakan

8.	(M Ahdiyana, AD Sukmawati, 2022) <i>Policy communication in the implementation of the Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial program in the City of Yogyakarta</i>	Kualitatif Studi ini tujuannya untuk menganalisis komunikasi kebijakan dalam penyelenggaraan jaminan sosial keluarga sasaran di Kota Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi, kejelasan, konsistensi informasi telah mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Penyampaian informasi telah dilakukan melalui koordinasi secara berkala. Sedangkan penyampaian informasi untuk komunikasi dilaksanakan melalui sosialisasi di media televisi dan liputan media massa. Pemahaman dan kompetensi pelaksana kebijakan dalam tugasnya juga mendukung proses ini. Kejelasan informasi tentang implementasi kebijakan telah ditetapkan dalam peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan program. Salah satunya adalah penggunaan tujuh aspek dan enam belas parameter dalam pengumpulan data. Selain itu juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya, meski masih ada persoalan suka dan tidak suka dalam pendataan. Penerapan peraturan, perintah dan informasi yang konsisten juga memudahkan para pelaksana dalam menerapkan kebijakan di lapangan.
9.	(D Darmawan, D Supriadi, M Alinawati, 2018) <i>Communication Policy Management of the Curriculum Implementation in Indonesia</i>	Kualitatif Menganalisis faktor yang berpengaruh dalam kelancaran kebijakan kurikulum 2013 pada tingkat persekolahan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 2013 dipengaruhi oleh kejelasan faktor kebijakan pengelolaan komunikasi yang diperankan oleh pemangku kepentingan di tingkat Dinas Pendidikan.
10.	(M Ikhsan, R Yusran, 2023) Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting Di Kota Padang	Kualitatif Menganalisis faktor yang mendukung serta menghambat komunikasi kebijakan pencegahan stunting sesuai Aturan Presiden No 72 Tahun 2021 yang didasarkan pada lima pilar yang bertujuan mempercepat	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kota Padang telah menerapkan Komunikasi Kebijakan Pencegahan Stunting dalam beberapa cara, seperti bekerja sama dengan organisasi pemerintahan daerah terkait, menyajikan sosialisasi kepada masyarakat, dan menggunakan media untuk berkomunikasi. Namun, karena anggaran terbatas, perbedaan pendapat, pola pikir, dan pandangan membuat komunikasi

		penurunan stunting untuk menggapai pembangunan berkelanjutan.	kebijakan belum berjalan sesuai dengan harapan.
11.	(AM Wumu, S Dengo, V Londa, 2022) Komunikasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Watudambo Ii Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara	Kualitatif Tujuan studi iniialah untuk memahami komunikasi kebijakan pengelolaan dana desa	Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan transmisi terlihat dari berjalannya musyawarah desa, kejelasan terlihat dari aktivitas yang dibiayain dengan dana desa diinformasikan dengan jelas kepada seluruh pihak yang terkait, konsistensi terlihat dari keputusan kebijakan yang telah disampaikan secara konsisten.
12.	(ZA Rangkuti, MR Rangkuti, 2021) Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan	Kualitatif Bertujuan mengkaji komunikasi kebijakan dengan teori triple helix.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan melakukan sejumlah komunikasi, termasuk Sosialisasi Perencanaan E-Parking yang diikuti oleh perwakilan semua juru parkir di Kota Medan, workshop, dan fokus kelompok. Di sisi lain, para calon juru parkir elektronik berkomunikasi secara langsung dan berbicara tentang bagaimana menerapkan teknologi di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan kemudian menggunakan pendekatan door-to-door untuk menyediakan program E-Parking kepada juru parkir jalan dan mengadakan pertemuan koordinasi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan warga. Namun, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan program E-Parking. Salah satunya adalah salah satu stakeholder yang tidak jelas tentang bagaimana menjalankan program, yang menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, pemerintah tidak selalu berkomunikasi dengan juru parkir lama.
13.	(RM Wendra, E Larasati, T Yuniningsih, T Afrizal, 2020) <i>Policy</i>	Kualitatif Salah satu tujuan dari studi ini ialah untuk menganalisa komunikasi yang ada	Komunikasi mengenai penerapan kebijakan perizinan usaha pengurusan dan pemanfaatan sarang burung walet di Kota Pekanbaru tercermin dalam penyampaian informasi antara

	<i>Communication of Licensing Business Swallow's Nests in Pekanbaru City</i>	dalam undang-undang yang mengatur dan mengeksploitasi sarang burung hantu di Pekanbaru.	pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran, serta diuraikan dari aspek saluran komunikasi yang dimanfaatkan serta keakuratan dan kejelasan pesan yang diterima. Penyampaian informasi tentang kebijakan kepada pelaksana kebijakan sudah cukup baik, namun komunikasi kepada kelompok sasaran kurang optimal dengan media komunikasi berupa sosialisasi yang belum efektif.
--	--	---	--

Dari 15 artikel jurnal penelitian terdahulu tersebut memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan mengenai teori komunikasi kebijakan yang menjadi bahan acuan bagi penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan teori komunikasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward dengan tiga indikator penentu kesuksesan pada variabel komunikasi didalam implementasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Penelitian mengenai “Komunikasi Kebijakan dalam Impelementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) di Kecamatan Ungaran Barat” diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan untuk penelitian mendatang.

1.6.2 Kebijakan Publik

Pandangan Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3), administrasi publik didefinisikan sebagai tahapan di mana personel publik dan sumber daya diatur serta dikoordinasikan untuk membuat rumus dan menerapkan kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menyatakan bahwasanya administrasi publik merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengelola urusan publik serta menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang sudah ditentukan. Menjadi disiplin ilmu, administrasi publik

berfokus pada penyelesaian masalah publik melewati peningkatan atau penyempurnaan dalam sumber daya manusia, bidang organisasi, dan keuangan.

Menurut Mc Curdy dalam Keban (2014:3), dinyatakan bahwasanya administrasi publik dapat dipandang sebagai proses politik, ialah salah satu teknik pemerintahan negara serta cara utama untuk menjalankan beberapa fungsi negara. Dengan kata lain, dijelaskan bahwa administrasi publik tidak hanya berhubungan dengan manajemen, namun juga terkait dengan politik. Meskipun pandangan ini mungkin membuat bingung dalam mendefinisikan administrasi publik dan ruang lingkupnya, perihal ini juga menunjukkan bahwasanya bidang tersebut terus berkembang dan sulit dipisahkan dari dunia politik.

Perkembangan dalam suatu disiplin ilmu bisa dilacak melalui perubahan atau pergeseran paradigma. Kuhn (dalam Keban, 2014) menjelaskan bahwasanya paradigma ialah nilai-nilai, cara pandang, cara, metode, atau prinsip dasar pemecahan masalah yang diterima oleh komunitas ilmiah pada sebuah periode tertentu. Ketika paradigma menghadapi krisis, kepercayaan kepada cara pandang tersebut mulai menurun, dan masyarakat mencari pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hubungan krisis ini dengan kemajuan ilmu administrasi publik menunjukkan adanya perubahan dari cara pandang lama ke yang baru. Terdapat enam paradigma administrasi publik yang telah berkembang, yang akan dijelaskan sebagai berikut..

Paradigma 1 (1900-1926) terkenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi, dengan tokoh utama J. Goodnow dan Leonard D. White. Pada paradigma ini, penekanan diberikan hanya pada aspek lokasi, yaitu birokrasi

pemerintahan, tanpa disertai penjelasan mendalam mengenai fokus atau metode yang seharusnya digunakan dalam administrasi publik.

Paradigma 2 (1927-1937) dikenal menjadi paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Aktor kunci dalam paradigma ini meliputi Gullick, Willoughby, dan Urwick, yang pemikirannya dipengaruhi oleh ahli manajemen klasik misalnya Taylor dan Fayol. Mereka mengenalkan prinsip-prinsip administrasi yang dirangkum dalam konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*), yang dianggap sifatnya universal dengan fokus pada administrasi publik.

Paradigma 3 (1950-1970) dikenal sebagai paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Tokoh terkemuka dalam paradigma ini ialah Morstein-Marx, yang berpendapat bahwasanya pemisahan politik dan administrasi tidak realistis. Herbert Simon juga menyatakan bahwasanya prinsip-prinsip administrasi tidak berlaku secara universal, namun administrasi negara dapat diterapkan di mana saja. Fokus utama pada paradigma ini ialah birokrasi pemerintahan. Pada periode ini, administrasi publik menghadapi krisis identitas karena dominasi ilmu politik dalam administrasi publik.

Paradigma 4 (1956-1970) dikenal sebagai paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Pada paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya populer terus dikembangkan dengan cara ilmiah dan mendalam. Fokus utama mencakup analisis manajemen, perilaku organisasi, implementasi teknologi modern misalnya analisis sistem, teknik kuantitatif, riset operasi, dan semacamnya.

Paradigma 5 (1970-sekarang) dikenal sebagai paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini memiliki fokus dan lokasi yang jelas. Fokusnya mencakup teori manajemen, teori organisasi, dan kebijakan publik, sementara lokusnya berhubungan dengan masalah-masalah dan kepentingan publik.

Paradigma 6 (1990-sekarang) terkenal sebagai paradigma Governance. Ini adalah paradigma terbaru dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Governance merujuk pada sistem kebijakan, nilai, dan kelembagaan yang mengelola urusan sosial, politik, dan ekonomi melewati kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Proses dan mekanisme ditekankan dalam paradigma ini, di mana kepentingan masyarakat dan kelompok dapat disampaikan, perbedaan dimediasi, serta hak dan kewajiban dijalankan. Lingkungan politik dan hukum yang kondusif diharapkan diciptakan oleh pemerintah, sektor swasta diharapkan berperan dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan, sementara interaksi sosial politik yang sehat dijalankan oleh masyarakat.

Studi ini termasuk ke dalam paradigma keenam atau paradigma governance. Dalam paradigma ini membicarakan kewajiban dan tugas pemerintah dalam menyajikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, dengan tujuan agar kepuasan masyarakat dapat dicapai. Selain itu, paradigma ini juga membicarakan perkembangan pemerintah menuju pemerintahan yang baik atau good governance melewati pemberian pelayanan publik yang baik serta peningkatan kinerja pegawai untuk mencapai tujuan, yaitu kepuasan masyarakat.

Thomas R. Dye, seperti yang dikutip dalam Miftah Thoha (2011: 107), mendefinisikan kebijakan publik sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (*whatever government chooses to do or not to do*). Dengan makna ini, fokus kebijakan publik tak hanya diarahkan pada tindakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga mencakup apa yang tidak dijalankan oleh pemerintah.

Sementara menurut David Easton, yang dikutip oleh Leo Agustino (2009: 19), kebijakan publik didefinisikan sebagai "*the authoritative allocation of values for the whole society*". Arti ini menekankan bahwasanya hanya pihak yang memiliki otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah bisa mengambil tindakan kepada masyarakat. Penentuan pemerintah untuk menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu diwujudkan melalui pengalokasian nilai-nilai. Perihal ini karena pemerintah, sebagai "*authorities in a political system*", adalah pihak yang berwenang dalam sistem politik dan bertanggung jawab dalam menangani masalah khusus. Mereka diharapkan membuat keputusan yang kemudian diterima dan mengikat kebanyakan anggota masyarakat selama periode khusus.

Secara etimologis, kata "*policy*" berasal dari kata Yunani "*polis*," yang artinya negara-kota. Pada bahasa Latin, kata tersebut berubah menjadi "*politia*," yang artinya negara. Pada bahasa Inggris Kuno (Middle English), istilah ini berkembang menjadi "*policie*," yang berhubungan dengan urusan administrasi atau pemerintah. Menariknya, pada bahasa Indonesia, kata "*kebijaksanaan*" atau "*kebijakan*" yang diterjemahkan dari "*policy*" memiliki konotasi tersendiri. Kata

ini berakar dari kata "bijaksana," yang mirip dengan makna "*wisdom*" pada bahasa Inggris, asalnya dari kata sifat "*wise*."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas mengenai kebijakan publik, berbagai karakteristik dari konsep kebijakan publik dapat disimpulkan. Pertama, kebijakan publik biasanya fokus pada perbuatan yang mempunyai tujuan atau maksud khusus, bukan pada sikap yang acak atau berubah- ubah. Kedua, kebijakan publik mencakup serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pejabat pemerintah, bukan keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik mencerminkan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam mengelola perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menyediakan layanan kepada masyarakat, bukan hanya apa yang direncanakan atau diinginkan. Keempat, kebijakan publik bisa bersifat positif dan juga negatif. Kelima, kebijakan publik setidaknya dengan cara positif dilandaskan pada hukum dan sifatnya memerintah. Kebijakan publik yang memerintah kemungkinan besar memiliki sifat memaksa secara sah, yang tak dimiliki oleh kebijakan organisasi swasta

1.6.3 Komunikasi Kebijakan

Pandangan Cook & Hunsaker (2007), tujuan komunikasi adalah untuk menumbuhkan koordinasi, menyampaikan informasi, dan memenuhi keperluan sosial. Dengan begitu, komunikasi yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi dapat mendukung pencapaian tujuannya. Dalam konteks penerapan kebijakan, model penerapan kebijakan menurut Edward III, seperti yang disampaikan oleh Agustino (2006), dipengaruhi oleh empat variabel, ialah: (1) sumber daya, (2)

komunikasi, (3) struktur birokrasi, dan (4) disposisi. Keempat variabel ini saling berkaitan satu sama lain.

Agustino (2006) menegaskan bahwa komunikasi adalah salah satu variabel kunci yang memberikan pengaruh penerapan kebijakan publik, karena komunikasi yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan penerapan kebijakan publik. Penerapan yang efektif hanya dapat terjadi apabila para pembuat keputusan memahami apa yang harus dilakukan. Abdul Wahab (2005) dalam bukunya menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan pada dasarnya adalah komunikasi yang berlangsung di dalam pemerintah, yang berarti pemberian program, pesan, dan ide-ide pemerintah kepada masyarakat untuk menggapai tujuan negara.

Edwards III (1980:37) menjelaskan bahwa dalam proses komunikasi kebijakan, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan pada hasil komunikasi kebijakan: pertama, transmisi (*transmission*), yang mencakup seberapa efektif penyampaian informasi; kedua, kejelasan (*clarity*), yaitu kejelasan mengenai materi komunikasi termasuk rincian kebijakan, siapa yang terlibat, cara, lokasi, dan alasan implementasi kebijakan; dan ketiga, konsistensi (*consistency*), yang berarti komunikasi kebijakan harus konsisten dan berkelanjutan hingga tujuan implementasi tercapai. Ketiga aspek ini memainkan peran krusial dalam efektivitas implementasi kebijakan.

Edwards III juga mengidentifikasi tiga variabel indikator dari komunikasi dalam penerapan kebijakan: dimensi kejelasan (*clarity*), dimensi penyampaian (*transmission*), dan dimensi konsistensi (*consistency*). Pengaruh ketiga dimensi ini terhadap komunikasi kebijakan akan dijelaskan lebih lanjut.

1. Penyampaian (transmisi)

Transmisi ialah proses penyaluran informasi dari komunikator kepada komunikan. Transmisi menghendaki tidak hanya pelaksana kebijakan yang harus menerima kebijakan publik, namun juga kelompok sasaran dan pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung kepada kebijakan. tersebut. Dalam karya Harold Lasswell yang berjudul *The Structure and Function of Communication in Society*, dikemukakan bahwasanya komunikasi terdiri dari lima unsur, di antaranya adalah:

- **Komunikator** (*Who Says*) Siapa yang mengatakan atau menyampaikan pesan. Ini mengidentifikasi sumber informasi atau orang yang berbicara. Komunikator berperan sebagai pengambil keputusan kebijakan (*policy maker*) dan pelaksana kebijakan yang sering kali berada pada berbagai tingkatan dalam birokrasi. Ibrahim (2003:17) menjelaskan bahwa seorang komunikator harus memenuhi sejumlah ketenruan dasar untuk menjalankan komunikasi, ialah keterampilan dalam memberikan pengaruh orang lain, pemahaman mendalam mengenai substansi kebijakan yang akan disampaikan, serta kepercayaan diri yang tinggi.
- **Pesan** (*What*): Apa yang dikatakan atau disampaikan. Pesan adalah sebuah pernyataan yang akan diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa gagasan, ide, perasaan, atau apapun yang ingin disampaikan dan memiliki makna bagi penerima.

- **Media** (*In Which Channel*): Melalui saluran apa pesan disampaikan. Ada berbagai cara, metode, dan saluran komunikasi, termasuk komunikasi lisan baik secara individu maupun massa, serta komunikasi tertulis seperti brosur, poster, selebaran, dan leaflet, serta media audio-visual seperti TV, CD, dan film. Makin banyak cara, metode, dan saluran yang dipakai dengan kombinasi yang tepat dan sasaran yang sesuai, semakin baik pemahaman penerima kepada pesan kebijakan (Ibrahim dkk, 2003:18). Deutshman (1983), yang dikutip oleh Fliegel (1984) dalam Swanson (1984:79-80), dalam penelitiannya terkait media penyuluhan di negara berkembang, menunjukkan bahwasanya materi tertulis hanya bisa menjangkau audiens yang terbatas, sehingga komunikasi tatap muka secara lisan sering kali lebih efektif meskipun lebih mahal karena memungkinkan komunikasi dua arah. Kehadiran media audio-visual misalnya televisi dan radio dapat memperbanyak jangkauan penerima pesan, sementara media komunikasi elektronik terbaru misalnya internet masih berada di bawah cakupan audio-visual.
- **Komunikan** (*To Whom*): Kepada siapa pesan disampaikan. Komunikan ialah pihak yang menerima informasi atau pesan kebijakan, yang bisa dibagi menjadi penerima yang dikehendaki dan penerima yang tak dikehendaki (Ibrahim dkk., 2003:40).
- **Efek** (*With What Effect*): Dengan efek apa pesan disampaikan. Efek juga merujuk pada umpan balik, yaitu informasi atau tanggapan yang diberikan oleh individu atau kelompok mengenai hasil atau kinerja seseorang, suatu

produk, atau sebuah proses. Feedback membantu komunikator memeriksa apakah pesan mereka telah dipahami dan diterima sebagaimana dimaksud. Ini memungkinkan komunikator untuk memodifikasi strategi komunikasi mereka sesuai kebutuhan.

2. Kejelasan (*clarity*)

Kejelasan di sini berarti kemampuan komunikasi untuk memahami informasi yang disampaikan oleh komunikator dengan baik. Informasi kebijakan yang sudah diberikan kepada penerima pesan mungkin tidak menghasilkan penerapan yang efektif apabila informasi tersebut kurang jelas. Informasi yang tidak jelas seringkali bersifat umum dan global, tanpa menjabarkan rincian langkah-langkah penerapan kebijakan. Akibatnya, keputusan yang diambil oleh pelaksana juga cenderung bersifat global dan umum, yang dapat menyebabkan implementasi yang tidak akurat.

Bischof dan Eppler dalam penelitiannya yang berjudul “*Caring for Clarity in Knowledge Communication*” mengembangkan sebuah formula C- L-E-A-R untuk memastikan kejelasan dalam komunikasi pengetahuan. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing unsur dalam formula C-L- E-A-R:

- **C – *Conciseness***

Kesederhanaan: Kesederhanaan sangat penting untuk kejelasan karena terlalu banyak informasi tidak dapat diubah menjadi pengetahuan (sindrom kelebihan informasi). Komunikasi harus fokus pada elemen esensial dan menunjukkan mereka dalam ringkasan sebelum masuk ke detail.

Komunikator harus menghindari kalimat panjang atau deviasi yang tidak perlu.

- **L - *Logical Structure***

Struktur Logis: Struktur komunikasi pengetahuan harus logis dan dapat diakses: logis dalam arti bahwa elemen-elemen membangun satu sama lain dalam urutan; dapat diakses dalam arti bahwa struktur tersebut jelas dan intuitif. Struktur yang tidak logis dapat memberikan pesan yang tidak jelas. Dengan demikian, kebijakan harus dibangun secara sistematis dan terstruktur.

- **E - *Explicit Context***

Konteks pengetahuan harus dibuat eksplisit dengan mempertimbangkan audiens, alasan komunikasi pengetahuan, dan urgensi serta pentingnya. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah:

- Apakah jelas siapa yang harus membaca ini?
- Apakah jelas bagaimana dan kapan ini harus digunakan?
- Apakah jelas mengapa ini dikembangkan dan oleh siapa?.

- **A - *Ambiguity Low***

Kurangnya Ambiguasi: Ambiguasi harus ditekan agar komunikasi menjadi lebih jelas. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok fokus dan panel kejelasan untuk memastikan bahwa pesan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam.

- **R – *Resonance***

Resonansi penting karena pengetahuan dapat diintegrasikan dan diaplikasikan dengan lebih mudah ketika seseorang dapat menghubungkan insiatif baru dengan yang sudah ada dan ada konotasi emosional. Pesan harus disesuaikan dengan gambaran, pengalaman, dan foreknowledge audiens.

Disparitas informasi dalam komunikasi kebijakan dapat timbul akibat kurangnya standar informasi kebijakan yang baku, tak adanya kualifikasi komunikator yang ditetapkan, serta variasi dalam imajinasi dan kreativitas implementator, yang dapat menyebabkan fokus implementasi kebijakan menjadi beragam dan bertingkat-tingkat. Selain itu, ketidakjelasan dalam komunikasi juga bisa disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kurangnya antisipasi terhadap perubahan, perubahan yang tidak tepat, pengurangan diskresi, keputusan pengadilan yang ambisius, dan nilai fleksibilitas (Edwards III, 1980:31-40). Edwards III (1980:36-40) juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam kejelasan komunikasi, termasuk kompleksitas dalam penentangan publik, pembuatan kebijakan, tujuan yang berlawanan, keperluan untuk mencapai konsensus, ketidakbiasaan terhadap program- program baru, dan karakteristik keputusan pengadilan.

3. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi komunikasi mengacu pada penyampaian informasi yang tidak berubah-ubah atau bertentangan serta adanya pengulangan dalam penyampaian informasi. Dalam implementasi kebijakan, konsistensi sangat penting untuk menjaga persepsi, mengarahkan implementasi dengan jelas, dan mempertahankan

sikap pelaksana kepada kebijakan, sehingga dapat mencapai kinerja kebijakan yang diinginkan. Konsistensi di sini berarti terdapat kesesuaian, keselarasan, dan kesinambungan dalam informasi yang disampaikan, baik dari segi waktu dan juga pihak-pihak yang menyampaikannya.

Komunikasi yang tidak konsisten dalam penerapan kebijakan bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti pergantian pejabat, perubahan kebijakan, dampak eksternal yang kuat misalnya hasil evaluasi program, serta nilai-nilai kepentingan seperti politik, ekonomi, dan sosial, yang dapat mempengaruhi tingkat dukungan kepada implementasi kebijakan.

4. Faktor pendorong komunikasi kebijakan :

Implementasi kebijakan sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Menurut Gow dan Morss dalam Pasolong (2011:59), terdapat kendala dari dua sumber: internal (dari dalam) dan eksternal (dari luar). Hambatan internal atau faktor internal mencakup ketersediaan dan kualitas input misalnya dana, sumber daya manusia, informasi, struktur organisasi, fasilitas dan sarana, serta sistem, aturan, dan prosedur yang harus diterapkan. Sementara itu, kendala eksternal mencakup semua kekuatan yang memberikan pengaruh proses penerapan kebijakan pemerintah, baik dengan cara langsung dan juga tidak langsung, termasuk kelompok sasaran, tren politik, ekonomi, kondisi sosial budaya, dan faktor lainnya. Menurut Ngalimun (2017) dalam bukunya "Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis," keberhasilan komunikasi dipengaruhi dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Kredibilitas Komunikator.

Ngalimun menjelaskan bahwa kredibilitas komunikator sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Kredibilitas ini diukur berdasarkan beberapa komponen, yaitu:

- Keahlian (*Expertness*): Komunikator yang dianggap ahli dalam bidangnya akan lebih dipercaya. Perihal ini karena mereka mempunyai pemahaman yang luas dan dapat memberikan informasi yang akurat.
- Dinamisme (*Dynamism*): Komunikator yang dinamis, aktif, dan energik akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Mereka dapat memotivasi dan memengaruhi audiens dengan cara yang lebih kuat
- Keamanan (*Safety*): Komunikator yang dipandang sebagai orang yang dapat menjamin keamanan bagi pihak komunikan akan lebih dipercaya. Mereka harus memahami situasi dan kondisi psikologis komunikan untuk memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan.
- Keterbukaan (*Extroversion*): Komunikator yang terbuka dan tidak malu-malu akan lebih efektif dalam berkomunikasi. Mereka memberi peluang bagi komunikan untuk terbuka dan berbagi informasi.

2. Pengetahuan Komunikan

Kredibilitas komunikator juga dipengaruhi oleh persepsi komunikan. Jika komunikan menganggap komunikator jujur dan tidak berpihak, maka mereka akan lebih mudah menerima pesan yang disampaikan (Rakhmat dalam Ngalimun,

2002). Selain itu motivasi komunikasi juga sangat penting. Jika komunikasi memiliki kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi, maka mereka akan lebih terdorong untuk menerima dan mengikuti pesan yang disampaikan (Bernlund dalam Rismawaty, Desayu, dan Sangra, 2014).

3. Pesan yang Dirancang Sedemikian Rupa

Pesan yang diberikan harus jelas, akurat, komunikatif, rasional, dan informatif. Komunikasi harus memiliki keterampilan untuk membuat pernyataan yang tepat dan relevan dengan karakteristik, kualitas, dan kinerja suatu produk. Pesan yang disampaikan juga harus berisi argumentasi yang kuat. Hal ini memungkinkan komunikasi untuk memahami dan menerima pesan dengan lebih baik.

5. Faktor penghambat komunikasi kebijakan :

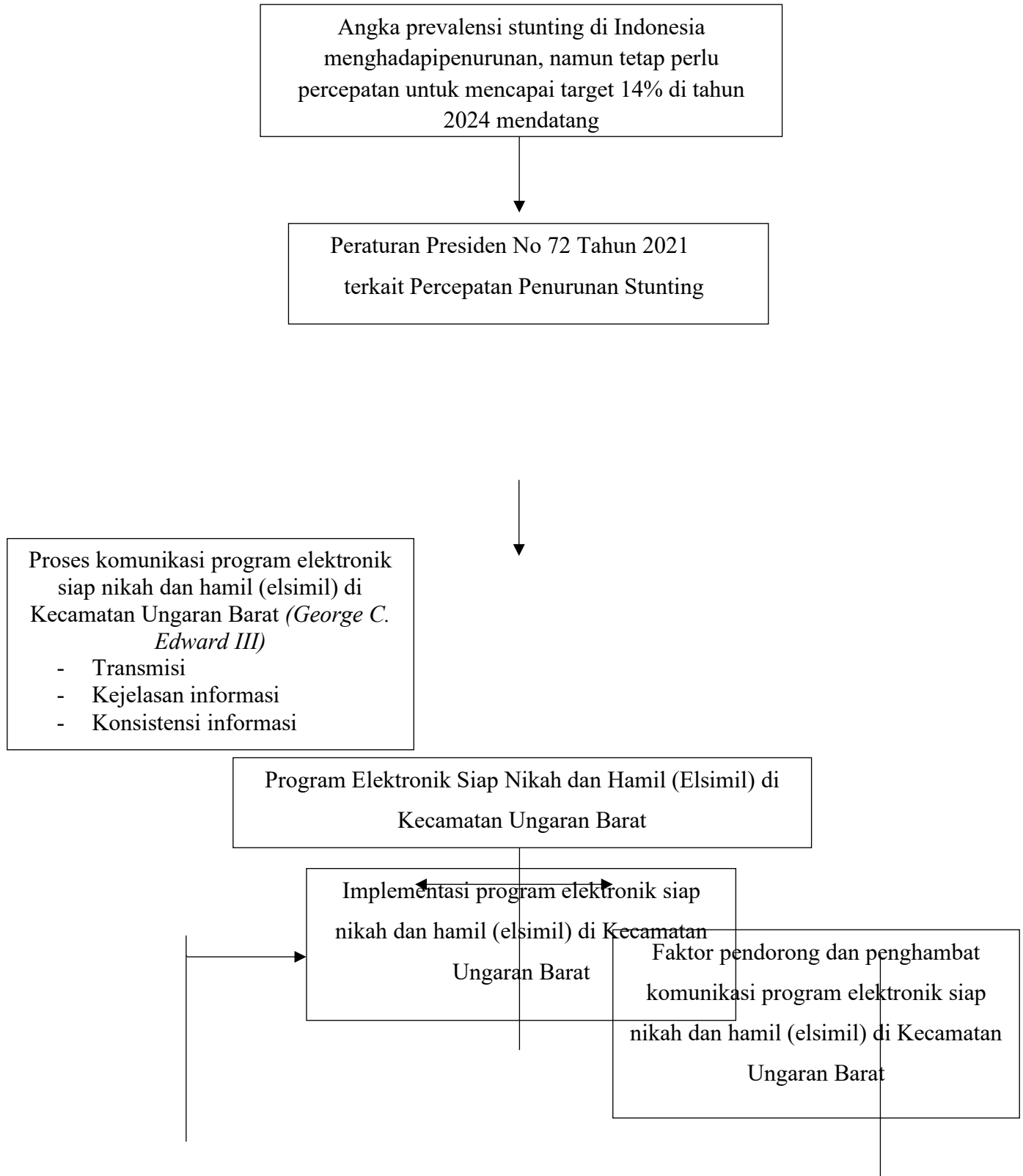
Menurut Ngalimun (2017)

- Hambatan Teknis (Noise Factor): Ngalimun menyebutkan bahwa hambatan teknis dapat menyebabkan pesan yang tidak disampaikan secara utuh kepada komunikasi dapat mengakibatkan gangguan teknis, seperti suara yang tertutup oleh bunyi bising dapat mengganggu proses komunikasi, terutama dalam komunikasi yang menggunakan media (Ngalimun, 2017:14).
- Hambatan Bola Salju (*Snow Ball Effect*): Hambatan bola salju terjadi ketika Komunikasi mungkin salah memahami atau menyimpang jauh dari pesan asli. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan dalam kemampuan setiap individu untuk menerima dan mengartikan pesan. Dalam kehidupan

sehari-hari, komunikasi sering mengalami gangguan ini (Ngalimun, 2017:14).

- Kurangnya Perhatian atau Minat Komunikan: Ngalimun juga menyebutkan bahwa kurangnya perhatian atau minat komunikan terhadap apa yang disampaikan dapat menjadi hambatan. Komunikator harus memperhatikan bahwa komunikan memiliki kebutuhan dan minat yang perlu dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi (Ngalimun, 2017:14).
- Kurangnya Kemauan dalam Dirinya Komunikan: Selain itu, kurangnya kemauan dalam diri komunikan juga dapat menghambat proses komunikasi. Komunikator harus memahami bahwa motivasi komunikan sangat penting untuk memotivasi mereka dalam menerima dan mengikuti pesan yang disampaikan (Ngalimun, 2017:14).
- Kurangnya Pengetahuan Komunikan: Pengetahuan komunikan yang terbatas juga dapat menjadi hambatan. Komunikator harus memahami bahwa komunikan memiliki pengetahuan yang berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan karakteristik komunikan (Ngalimun, 2017:14).
- Faktor Lingkungan: Situasi atau lingkungan (waktu, tempat, cuaca, psikologis dan iklim keadaan alam) juga dapat mempengaruhi proses komunikasi. Kondisi lingkungan ini membutuhkan adaptasi dan penyesuaian dalam berkomunikasi (Adhytia Prayoga Asmi Munandar Luthfi Herfianto, 2020).

1.7 Kerangka Pikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan unsur penelitian yang memberi tahu bagaimana caranya mengetahui lebih dalam pada suatu fenomena, semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengetahui lebih dalam pada suatu fenomena. Penelitian ini berfokus pada komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil). Terdapat beberapa fenomena yang digunakan untuk memperjelas hasil komunikasi program dari setiap penelitian yang ada di lapangan. Proses komunikasi program dalam penelitian ini akan dikaji dengan konsep komunikasi kebijakan milik George C. Edward III.

1.8.1 Komunikasi Kebijakan

- 1) Transmisi ialah proses penyaluran informasi dari komunikator kepada komunikan. Keberhasilan dalam transmisi komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) dilihat dari bagaimana program ini dapat dikomunikasikan oleh tim pendamping keluarga dengan menggunakan saluran komunikasi kepada keluarga yang mempunyai calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu bersalin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia dibawah 5 tahun (balita) yang merupakan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Program Elsimil dapat dikomunikasikan dengan baik didalam struktur birokrasi maupun ke kelompok sasaran kebijakan dan kelompok kepentingan. Keberhasilan dilihat dari aspek komunikator, komunikan dan penggunaan sarana komunikasi dan saluran yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan kepada kelompok sasaran.

- 2) Kejelasan yang dimaksud disini adalah ketika komunikan bisa mengerti dengan baik informasi yang diberikan oleh komunikator. Kejelasan komunikasi program elsimil untuk percepatan penurunan stunting dilihat dari kejelasan konten dan konteks berupa maksud, tujuan, sasaran kejelasan waktu pelaksanaan, kejelasan materi dan saluran komunikasi, serta pemahaman pelaksana kebijakan mengenai program elsimil untuk percepatan penurunan stunting.
- 3) Konsistensi komunikasi adalah informasi yang diberikan tidak berubah-ubah dan bertentangan serta terdapat pengulangan dalam memberikan informasi. Konsistensi komunikasi dilihat dari tidak adanya perbedaan isi dan perubahan informasi tentang aplikasi elsimil untuk percepatan penurunan stunting kepada pelaksana kebijakan. Adanya komunikasi yang berkelanjutan serta tidak adanya kesimpangsiuran informasi mengenai aplikasi elsimil.

1.8.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Komunikasi Program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil)

- 1) Faktor pendorong internal ialah faktor-faktor dari dalam yang bisa menyukseskan jalannya komunikasi program Elsimil di Kecamatan Ungaran Barat.
- 2) Faktor pendorong eksternal ialah faktor-faktor dari luar yang bisa menyukseskan jalannya komunikasi program Elsimil di Kecamatan Ungaran Barat.

- 3) Faktor penghambat internal adalah faktor-faktor dari dalam yang sifatnya menghambat jalannya komunikasi program elsimil di Kecamatan Ungaran Barat.
- 4) Faktor penghambat eksternal adalah faktor-faktor dari luar yang sifatnya memberi hambatan jalannya komunikasi program elsimil di Kecamatan Ungaran Barat.

Tabel 4-Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang di dapat
Komunikasi program elsimil	Transmisi	Penyaluran informasi dari komunikator kepada komunikan dengan memanfaatkan media komunikasi
		- Komunikator (orang yang memberikan informasi)
		- Komunikan (orang yang mendapatkan informasi)
		- Media (media yang digunakan dalam penyaluran informasi)
	Kejelasan	Komunikan dapat memahami informasi mengenai program elsimil dengan jelas dan mudah dipahami.
Faktor pendorong dan penghambat komunikasi kebijakan percepatan penanganan penurunan stunting dalam implementasi aplikasi elsimil	Konsisten	- Informasi mengenai program elsimil tidak rancu akibat adanya perubahan - Adanya keberlanjutan komunikasi untuk meminimalisir kesimpangsiuran informasi
	Faktor pendorong internal	Faktor-faktor dari dalam yang dapat menyukseskan jalannya komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat.
	Faktor pendorong eksternal	Faktor-faktor dari luar yang dapat menyukseskan jalannya komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat.
	Faktor penghambat internal	Faktor-faktor dari dalam yang sifatnya menghambat jalannya komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat.
	Faktor penghambat eksternal	Faktor-faktor dari luar yang sifatnya menghambat jalannya komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Studi ini memanfaatkan teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pandangan Moleong (2013:6), penelitian kualitatif tujuannya untuk mengerti fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian, contohnya persepsi, perilaku, perbuatan, dan motivasi, secara menyeluruh. Pendekatan ini menggunakan deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata untuk menggambarkan konteks yang alami dengan menggunakan beberapa teknik yang bersifat alami. Tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk menerangkan secara mendalam proses suatu fenomena dengan mengumpulkan data secara mendetail, menekankan pada kedalaman dan detail informasi yang diteliti.

Studi ini tujuannya untuk mendeskripsikan proses komunikasi program elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan program tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi gambar dan kata-kata, dengan angka-angka hanya sebagai pelengkap. Penelitian deskriptif ini fokus pada menjelaskan sasaran yang tepat, karakteristik individu, kondisi gejala dalam kelompok, atau untuk memilih distribusi frekuensi hubungan antara gejala-gejala tertentu dalam masyarakat (objek penelitian).

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ialah tempat pelaksanaan penelitian. Studi ini dijalankan di Kecamatan Ungaran Barat. Pada studi ini peneliti menjalankan aktivitas penelitian serta pengamatan bagaimana proses komunikasi komunikasi program elektronik

siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat supaya peneliti bisa memperoleh informasi yang diperlukan dalam memanfaatkan teori yang sudah dipilih oleh peneliti.

1.9.3 Subjek Penelitian

Informan yang menjadi subjek studi ini ialah perorangan atau kelompok yang mempunyai informasi akurat yang bisa ditelusuri kembali ke fakta-fakta di lapangan. Dalam studi ini, peneliti menggunakan teknik snowball sampling dimana informan pertama ialah PKB Kecamatan Ungaran Barat. Kemudian akan berlanjut ke informan selanjutnya yaitu Tim Pendamping Keluarga yang ada di Kecamatan Ungaran Barat. Serta masyarakat Kecamatan Ungaran Barat.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang dimanfaatkan didalam studi ini ialah data kualitatif yang akan menganalisis data dan memperoleh informasi dengan melihat fenomena atau gejala sosial yang ditemui melalui pengembangan konsep teori yang telah ditentukan. Jenis data penelitian ini bersifat deksriptif sehingga dalam bentuk kalimat-kalimat yang menjelaskan hasil penelitian.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang memiliki bukti berupa data untuk didapatkan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan dua sumber data, ialah :

1. Sumber data primer

Data yang didapatkan atau diambil langsung dari sumbernya. Pada studi ini data didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada informan. Sumber

data primer pada studi ini ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang dan Tim Pendamping Keluarga yang ada di Kecamatan Ungaran Barat. Serta masyarakat Kecamatan Ungaran Barat.

2. Sumber data sekunder

Data pendukung yang didapatkan dari sumbernya, dengan susunan data berupa arsip atau dokumen. Pada studi ini data sekunder yang dimanfaatkan ialah tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, jurnal dan juga dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian sebagai sumber sekunder atau sumber kedua untuk memberi dukungan data primer.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan usaha untuk memperoleh informasi sebagai kelengkapan penelitian, ada juga teknik yang dimanfaatkan dalam pengumpulan data tersebut ialah dibawah ini:

1. Metode wawancara

Pandangan Eterberg (dalam Sugiyono, 2016 : 231), wawancara ialah ketika dua individu bertemu untuk sharing ide dan informasi melewati dialog tanya jawab, guna membentuk makna dalam topik khusus. Wawancara dipakai sebagai metode pengumpulan informasi bila peneliti ingin menjalankan penelitian awal untuk menjumpai isu yang perlu diteliti dan bila peneliti akan memahami dengan lebih dalam hal-hal dari responden.

Melewati teknik wawancara ini peneliti akan mencari informasi secara mendalam dari informan terkait bagaimana proses komunikasi program elektronik

siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat dan juga faktor-faktor yang menghambat dan mendorong program tersebut.

2. Metode observasi

Observasi atau pengamatan ialah metode pengumpulan data yang didapat dengan langsung di lapangan kepada permasalahan dan gejala yang diteliti. Bentuk observasi yang dijalankan ialah mencermati bagaimana proses komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat dan juga faktor-faktor yang menghambat dan mendorong program tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupaya mencari bukti-bukti yang terkait dengan objek penelitian. Pada studi ini peneliti memanfaatkan dokumen berisikan catatan-catatan, foto, dan rekaman dari informan yang berkaitan dengan proses komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat dan juga faktor-faktor yang menghambat dan mendorong program tersebut.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Sesudah menjalankan pengumpulan data, semua data yang terkumpul lalu diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini data dianalisis memanfaatkan teknik deskriptif kualitatif ialah dengan menjelaskan secara menyeluruh data yang diperoleh sewaktu tahapan penelitian. Terdapat beberapa tahapan yang akan menjadi acuan peneliti:

1. Reduksi data

Sesudah data terkumpul dari proses observasi, dokumentasi dan wawancara, dilakukan identifikasi satuan data untuk menemukan bagian dalam data yang

mempunyai makna apabila dihubungkan dengan masalah dan fokus penelitian. Reduksi data dapat dibuat dengan cara menyeleksi, membuat rangkuman singkat, dan mentranskrip penelitian untuk menegaskan fokus serta mengorganisasikan data dengan membuang yang tidak penting sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tepat dengan permasalahan pada fokus penelitian.

2. Penyajian data

Langkah berikutnya ialah menyajikan data pada bentuk uraian penjelasan dan tabel yang sifatnya deskriptif. Pada proses ini penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mempelajari, memahami, dan melihat secara sebagian atau keseluruhan bagaimana informasi yang diberikan akan memberikan suatu kesimpulan. Peneliti akan menjelaskan bagaimana proses komunikasi program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) di Kecamatan Ungaran Barat dan juga faktor-faktor yang menghambat dan mendorong program tersebut melalui susunan kalimat bersifat naratif, gambar, dan tabel sebagai data pendukung penelitian sehingga akan lebih mudah dimengerti.

3. Penarikan kesimpulan

Tahapan ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan. Sesudah seluruh data tersaji maka apa yang menjadi objek penelitian diambil kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang memungkinkan menjawab permasalahan penelitian.

1.9.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif memiliki ukuran kualitas yang baik. Standar kualitas yang baik mengungkapkan bahwasanya hasil dari penelitian dengan cara kualitatif

sudah valid dengan yang ada di lapangan. Dengan memilih validitas data atau keabsahan data, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi. Triangulasi ialah metode untuk mengecek validitas data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk kebutuhan yang lain sebagai pembanding dengan beberapa cara dan beberapa waktu. Penggunaan teknik triangulasi pada studi ini yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dimanfaatkan untuk membandingkan dan memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber yang berbeda

b. Triangulasi teknik

Data yang didapatkan melewati wawancara akan diverifikasi melalui observasi, pencatatan dokumen, dan studi pustaka. Jika terdapat perbedaan dalam data yang dihasilkan, penulis akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan informan atau sumber data lain untuk menjamin kebenaran data

c. Triangulasi waktu

Dalam rangka pengujian kualitas data, penulis bisa melakukan pemeriksaan hasil observasi, wawancara, atau metode lainnya dalam berbagai situasi dan waktu. Jika terjadi perbedaan data nanti, penulis akan terus mengumpulkan data sampai menjumpai kepastian.